



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4
Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Rabies di
Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur
(Studi Kasus : Kota Maumere, Kecamatan Kewapante
dan Kecamatan Waigete)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag
2016310069

Bandung
2021



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4
Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Rabies di
Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur
(Studi Kasus : Kota Maumere, Kecamatan Kewapante
dan Kecamatan Waigete)**

Skripsi

Oleh

Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag
2016310069

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, SIP.,M.Si

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag
Nomor Pokok : 2016310069
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 Tahun 2014
Tentang Penanggulangan Rabies di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa
Tenggara Timur (Studi Kasus : Kota Maumere, Kecamatan Kewapante
dan Kecamatan Waigete)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 8 Februari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Indraswari, M.A., Ph.D.

: 

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag
NPM : 2016310069
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka
No. 4 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Rabies
di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur
(Studi Kasus : Kota Maumere, Kecamatan
Kewapante dan Kecamatan Waigete)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 26 Desember 2020



Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag

Clarissa Pawdaag_Cek Skripsi Ganjil 20/21

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

ABSTRAK

Nama : Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag
NPM : 2016310069
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Rabies di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus : Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan rabies di Kabupaten Sikka dan upaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan rabies di Kabupaten Sikka. Teori yang digunakan adalah faktor-faktor penanggulangan rabies dari Tahulending, dkk 2015, Salomon, dkk 2016, Marlessy, dkk 2016, Parwis, dkk 2016 untuk melihat bagaimana faktor-faktor penanggulangan Rabies mempengaruhi implementasi kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu (1) Wawancara yang dilakukan dengan 2 orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yaitu Kepala Seksi P2PM dan Pelaksana P2PM, 2 orang dari Dinas Pertanian yaitu Kepala Seksi Kelembagaan Veteriner dan Buruh Tani Ternak, 2 orang Petugas Kesehatan Puskesmas dan Petugas Kesehatan Puskesmas, 2 orang LSM Yaspem yaitu Direktur dan Manager Program, serta 5 orang Masyarakat di Kabupaten Sikka. dan (2) studi dokumen dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Portal Berita, serta Website resmi dari Kementerian Kesehatan seperti Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penanggulangan Rabies di Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan waigete dalam pelaksanaannya belum optimal. Secara khusus dapat dilihat pada (1) Faktor-faktor Penanggulangan Rabies yaitu aspek *pengetahuan* dan aspek *tindakan masyarakat* masih belum cukup dan kurang, pada aspek *sikap* masih kurang dari yang diharapkan dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, aspek *sumber informasi* sudah cukup baik namun masih belum optimal dilakukan, aspek *dukungan petugas kesehatan* cukup baik. (2) Upaya dalam Penanggulangan rabies di Kabupaten Sikka yaitu *pencegahan rabies*, *pengendalian rabies*, *pemberantasan rabies* masih belum optimal dilakukan.

Kata kunci : Rabies, Penanggulangan Rabies, Faktor-faktor Penanggulangan Rabies

ABSTRACT

Name : Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag
NPM : 2016310069
Title : Implementation of Sikka District Regulation No. 4 of 2014 concerning Rabies Control in Sikka District, Flores, East Nusa Tenggara (Case Study: Maumere City, Kewapante District and Waigete District)

The purpose of this study was to determine the factors that influence the rabies control policy in Sikka Regency and the efforts to implement the rabies control policy in Sikka Regency. The theory used is the rabies control factors from Tahulending, et al. 2015, Salomon, et al. 2016, Marlessy, et al. 2016, Parwis, et al. 2016 to see how the rabies control factors affect the implementation of Rabies Control policies in Maumere City, Kewapante District and District Waigete.

The research method used in this research is qualitative research with qualitative data analysis techniques. The data collection used were (1) Interviews were conducted with 2 people from the Health Office of Sikka Regency, namely the Head of the P2PM Section and the P2PM Executive, 2 people from the Agriculture Office, namely the Head of the Section for Veterinary Institutions and Animal Farm Workers, 2 Puskesmas Health Officers and Health Officers Puskesmas, 2 Yaspem NGOs namely Program Director and Manager, and 5 community members in Sikka Regency. and (2) document study by utilizing official documents from the Health Service, Agriculture Service and News Portal, as well as the official website of the Ministry of Health such as the Ministry of Health's Data and Information Center.

The findings in this study indicate that the implementation of the Rabies Control Policy in Maumere City, Kewapante District and Waigete District is not optimal in its implementation. In particular, it can be seen in (1) Factors of Rabies Control, namely aspects of knowledge and aspects of community action that are still insufficient and insufficient, attitudes are still less than expected and there are still obstacles in its implementation, aspects of information sources are good enough but still not optimally done, the aspect of support from health workers is quite good. (2) Efforts to control rabies in Sikka Regency, namely prevention of rabies, control of rabies, eradication of rabies are still not optimal.

Keywords: Rabies, Rabies Control, Rabies Control Factors

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu. Adapun judul dari penulisan skripsi ini yaitu *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies di Kabupaten Sikka (Studi Kasus : Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete)*.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
3. Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan, dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman angkatan 2016 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

5. Grup Oooo dan Beloved Bro and Sis yang juga memberikan dukungan, memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Bapak, Mama, Kakak dan Adik-Adik, Keluarga Besar Pawdaag, Santo Situmorang, Keluarga Besar Maumere-Fores dan Keluarga Besar Pontianak yang memberikan dukungan dalam materil dan moril.

Penulis sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan tanpa Kuasa Tuhan dan Bimbingan Tuhan penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini pun, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan tulisan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandung, 26 Desember 2020

Penyusun,



Clarissa Afui Dua Nurak Pawdaag

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Rumusan Masalah	16
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	19
2.2. Perspektif Implementasi Kebijakan Publik	22
2.3. Konsep Penanggulangan Rabies	26
2.4. Faktor, Upaya dan Strategi dalam Penanggulangan Rabies.....	27
2.4.1. Faktor dalam Penanggulangan Rabies.....	27

2.4.2. Upaya dalam Penanggulangan Rabies.....	36
2.4.3. Strategi dalam Penanggulangan Rabies	42
2.4. Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Tipe Penelitian	49
3.2. Peran Peneliti.....	50
3.3. Lokasi Penelitian	51
3.4. Sumber Data	51
3.4.1. Sumber Data Primer	51
3.4.2. Sumber Data Sekunder	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5.1. Wawancara.....	53
3.5.2. Dokumentasi.....	54
3.6. Analisis Data	55
3.7. Uji Keabsahan Data.....	57
3.8. Operasional Variabel.....	58
BAB IV OBJEK PENELITIAN	63
4.1. Profil Kabupaten Sikka.....	63
4.2. Sejarah Kabupaten Sikka.....	65
4.3. Profil Maumere.....	68
4.4. Profil Kewapante	70

4.5. Profil Waigete	70
4.6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 4 tahun 2014	71
4.7. Data Kasus Rabies dan Populasi Hewan Penular Rabies.....	73
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	72
5.1. Profil Informan.....	72
5.1.1. Jenis Kelamin	73
5.1.2. Usia	74
5.1.3. Tingkat Pendidikan.....	75
5.2. Faktor-faktor penanggulangan Rabies	76
5.2.1. Pengetahuan	76
5.2.2. Sikap	103
5.2.3. Tindakan Masyarakat.....	117
5.2.4. Sumber Informasi.....	135
5.2.5. Dukungan Petugas Kesehatan.....	151
5.3. Strategi Penanggulangan Rabies.....	163
5.4. Upaya Penanggulangan Rabies	174
5.4.1. Pencegahan Rabies	174
5.4.2. Pengendalian Rabies.....	180
5.4.3. Pemberantasan Rabies	184
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	189
6.1. Kesimpulan.....	189

6.1.1. Faktor-faktor Penanggulangan Rabies	189
6.1.2. Upaya Penanggulangan Rabies	192
6.2. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	195
LAMPIRAN	199

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Situasi Rabies di Indonesia tahun 2016-2018.....	4
Grafik 5.1 Pengetahuan informan tentang Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014.....	77
Grafik 5.2. Pengetahuan Informan tentang Kebijakan lain selain PERDA No. 4 tahun 2014.....	80
Grafik 5.3. Informasi tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Rabies.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Situasi Rabies di Nusa Tenggara Timur 2017-2019.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Populasi HPR di Kabupaten Sikka tahun 2019	7
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	59
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sikka tahun 2017.....	64
Tabel 4.2 Jumlah Situasi Rabies di Indonesia tahun 2016-2018.....	73
Tabel 4.3 Jumlah Situasi Rabies di NTT tahun 2017-2019.....	73
Tabel 4.4 Jumlah Populasi HPR di Kabupaten Sikka tahun 2019	74
Tabel 5.1 Jenis Kelamin.....	73
Tabel 5.2. Usia.....	74
Tabel 5.3. Pendidikan.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.8 Model Kerangka Berpikir	48
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus yang dapat membahayakan sistem saraf pusat. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 tahun 2014, Rabies adalah penyakit zoonosa yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang susunan saraf pusat dan mempunyai nilai *case fatality rate* 100%.¹ Penyakit ini merupakan kelompok penyakit zoonosa (zoonosis) yaitu penyakit infeksi yang ditularkan oleh hewan ke manusia melalui pajanan atau gigitan hewan penular rabies (GHPR) yaitu anjing, kera, musang, anjing liar, kucing.² Penyakit infeksi yang ditularkan oleh virus rabies baik pada hewan maupun pada manusia yang telah menunjukkan gejala rabies dapat berakhir dengan kematian. Sebagian besar sumber penularan rabies ke manusia di Indonesia, disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi rabies (98%) dan lainnya oleh kera dan kucing.³

¹ Peraturan Daerah No 4 tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies, pada Bab I pasal 1 ayat 8, 2014
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71613/perda-kab-sikka-no-4-tahun-2014>, diakses tanggal 29 Agustus 2019, pukul 12.45 WIB

² Pusat Data dan Informasi Kementerian kesehatan RI, *Situasi dan Analisis Rabies*, Departemen Kesehatan, 2014, Hal. 1
<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-rabies.pdf>, diakses tanggal 29 Agustus 2019, pukul 15.40 WIB

³ Pusdatin, Ibid.

Menurut Soeharsono, rabies disebabkan oleh virus neurotropik yang merupakan virus dengan sasaran akhirnya pusat susunan syaraf, otak, dan sumsum tulang belakang dari hewan berdarah panas dan manusia. Virus rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksi dan ditularkan melalui gigitan atau jilatan Hewan Penular Rabies (HPR), terutama anjing, kucing, dan kerbau.⁴ Virus rabies masuk melalui luka gigitan, dan selama 2 minggu virus tetap tinggal pada tempat masuk dan daerah sekitarnya, kemudian bergerak mencapai ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa menunjukkan perubahan-perubahan fungsinya, sedangkan masa inkubasi bervariasi yaitu berkisar antara 2 minggu sampai 2 tahun, tetapi pada umumnya 3 sampai 8 minggu, tergantung lokasi gigitan dan jumlah virus yang masuk, hal tersebut berhubungan dengan jarak yang harus ditempuh oleh virus sebelum mencapai otak.⁵ Bervariasinya masa inkubasi cepat atau lambat tergantung pada dalam atau tidaknya luka bekas gigitan, luka tunggal atau luka jamak, dekat atau tidaknya luka gigitan dengan susunan saraf pusat seperti luka yang terjadi di daerah bahu ke atas mempunyai masa inkubasi yang lebih pendek, dan jumlah virus yang masuk ke tubuh.⁶

Sekitar 150 negara di dunia telah terjangkit rabies, dan sekitar 55.000 orang meninggal karena rabies setiap tahunnya. Lebih dari 15 juta orang yang

⁴ Imakahi, *Rabies Kian Menjadi Ancaman, Pemerintah Canangkan Program "Indonesia Bebas Rabies 2020"*, Imakahi, 2018 <https://imakahi.or.id/2018/09/28/kajian-edisi-world-rabies-day/>, diakses tanggal 31 Agustus 2019, pukul 22.39 WIB

⁵ Imakahi, *Ibid.*

⁶ Pusat Data dan Informasi Kementerian kesehatan RI, *Jangan ada lagi Kematian akibat Rabies*, Departemen Kesehatan, 2016, Hal. 2 <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-Rabies-2016.pdf>, diakses tanggal 9 September 2019, pukul 23.42 WIB

terpajut atau digigit hewan penular rabies di dunia, yang terindikasi mendapatkan pengobatan profilaksis Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk mencegah timbulnya rabies. Sekitar 40% dari orang yang digigit hewan penular rabies adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun.⁷

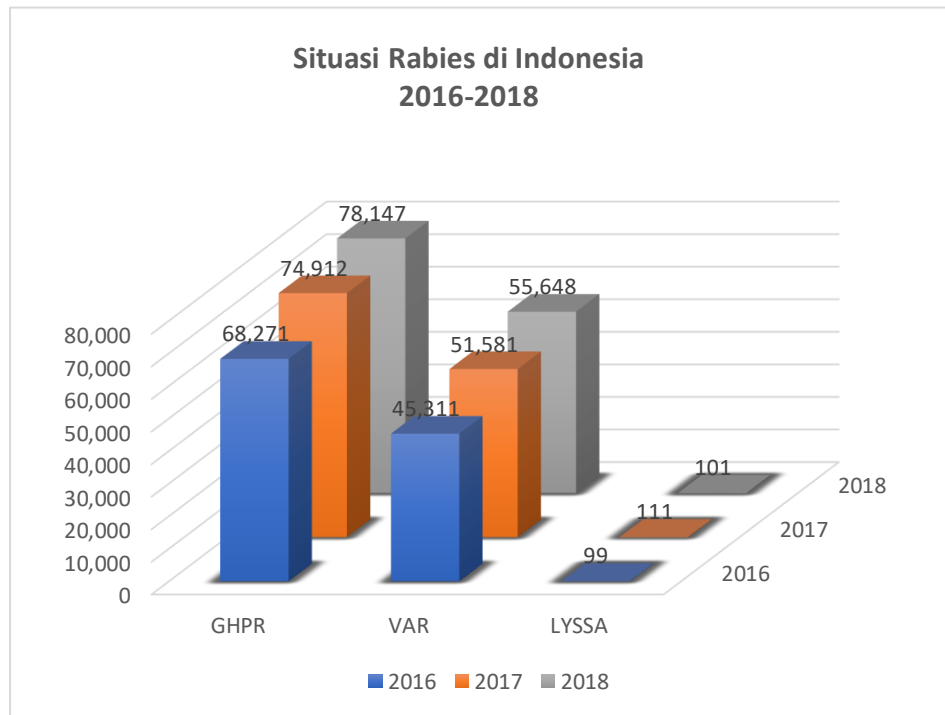
Rabies merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia dimana terdapat 24 provinsi penyakit rabies dari 34 provinsi dan 10 provinsi bebas rabies, provinsi sebagai daerah bebas rabies yaitu provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua dan Kalimantan Barat.⁸

Situasi Rabies di Indonesia berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan terdapat 68.271 kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), 45.311 kasus GHPR terindikasi yang diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan 99 jumlah kasus Lyssa (Rabies) pada tahun 2016, 74.912 kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), 51.581 kasus GHPR terindikasi yang diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) dan 111 Lyssa (Rabies) pada tahun 2017, dan 78.147 kasus GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), 55.648 kasus GHPR terindikasi yang diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR), dan 101 jumlah kasus Lyssa (Rabies) pada tahun 2018.⁹ Berikut situasi Rabies di Indonesia yang dapat dilihat pada grafik 1.1.

⁷ Pusdatin, Op.cit.

⁸ Pusdatin, Ibid.

⁹ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*, Pusdatin Kemkes, 2019, Hal. 171 tabel 6.34
<http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data->

Grafik 1.1 Situasi Rabies di Indonesia tahun 2016-2018

Sumber : Pusat data dan informasi kesehatan¹⁰

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi tertular rabies dengan sejarah penularan pertama kali pada tahun 1997 di Kabupaten Flores Timur, dan langsung mewabah ke sembilan kabupaten lainnya di daratan Pulau Flores dan Lembata dan hanya dalam waktu satu tahun rabies sudah menyebar di daratan Flores dan Lembata. Penularan di Kabupaten Sikka tahun 1998, Kabupaten Ende tahun 1999, Kabupaten Ngada tahun 2000 dan terakhir kabupaten Manggarai tahun 2001. Pada Akhir tahun 2001 penyebaran rabies ke arah timur yaitu di Pulau Lembata.¹¹

dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf, diakses tanggal 9 September 2019, pukul 23.53 WIB

¹⁰ Pusdatin, Ibid. Hal. 171 tabel 6.34

¹¹ Laurensius Molan, *Dilema pencegahan rabies di tengah ketiadaan VAR*, Antara New, 2019 https://aceh.antaranews.com/nasional/berita/1043968/dilema-pencegahan-rabies-di-tengah-ketiadaan-var?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, diakses tanggal 10 September 2019, pukul 03.21 WIB

Kasus Rabies di Nusa Tenggara Timur (NTT) cukup tinggi, namun solusi untuk mengurangi jumlah kasus penyebaran penyakit rabies di wilayah provinsi NTT belum terlihat secara signifikan. Hal ini dapat kita lihat pada data situasi Rabies provinsi NTT yaitu terdapat 9.624 GHPR, 8.965 VAR, dan 10 lyssa pada tahun 2017, 10.139 GHPR, 9.308 VAR, dan 12 Lyssa pada tahun 2018, dan 13.599 GHPR, 11.743 VAR, dan 15 Lyssa pada tahun 2019.¹² Sedangkan Di Kabupaten Sikka sendiri pertama kali ditemukan virus rabies pada tahun 1998. Sejak itu, setiap tahun selalu ditemukan rabies. Berikut situasi rabies di NTT dan 5 kabupaten yang ada di NTT dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Situasi Rabies di Nusa Tenggara Timur 2017-2019

Keterangan	2017			2018			2019		
	GHPR	VAR	Lyssa	GHPR	VAR	Lyssa	GHPR	VAR	Lyssa
NTT	9624	8965	10	10139	9308	12	13599	11743	15
Sikka	1262	972	3	1624	1325	2	1866	893	2
Ende	1736	1669	2	2013	1939	1	1754	1754	1
Nagekeo	1276	779	2	2012	1801	2	1586	1349	1
Ngada	1559	1543	1	1723	1848	2	1586	1950	1
Manggarai	984	759	2	1151	1149	1	1393	719	0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTT¹³

¹² Dinas Kesehatan Provinsi NTT, tanggal 11 Juni 2020, pukul 15.07 WIB

¹³ Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ibid.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui situasi Rabies di NTT setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan kasus rabies tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu jumlah GHPR sebesar 13.599 kasus, jumlah yang memperoleh VAR sebesar 11.743 dan jumlah yang positif rabies (lyssa) sebesar 15 kasus. Selain itu, jika dilihat berdasarkan kabupaten yang ada di NTT hanya terdapat 10 kabupaten dengan kasus rabies yaitu Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Dari 10 Kabupaten dengan kasus rabies di NTT tersebut, penulis memilih 5 Kabupaten dengan kasus lyssa tertinggi selama 3 tahun yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai. Walaupun jumlah kasus Lyssa di setiap kabupaten menunjukkan jumlah yang relatif sama, namun jumlah kasus Lyssa di Kabupaten Sikka menunjukkan jumlah yang lebih besar. Hal tersebut dapat kita lihat, dimana pada tahun 2017 jumlah lyssa yaitu 3 kasus, sedangkan 2018 dan 2019 memiliki jumlah yang sama yaitu 2 kasus.

Selain jumlah situasi rabies yang cukup tinggi, jumlah populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Sikka juga cukup tinggi. Pada tahun 2019 populasi HPR sebesar 64.502 ekor. Berikut jumlah populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Populasi HPR di Kabupaten Sikka tahun 2019

HPR	Jumlah
Anjing	61.204
Kucing	3.007
Kera	291

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka¹⁴

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat jumlah HPR yang ada di Kabupaten Sikka sebanyak 64.502 ekor dengan jumlah HPR tertinggi adalah anjing sebanyak 61.204 ekor, Kucing sebanyak 3.007 ekor dan Kera sebanyak 291 ekor. Berikut jumlah populasi hewan penular rabies di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sikka berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Sikka yang dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Populasi HPR di Kecamatan

Wilayah	Populasi			Total
	Anjing	Kucing	Kera	
Kecamatan Paga	2037	10	6	2053
Kecamatan Mego	2494	0	0	2494
Kecamatan Tanawawo	1951	4	0	1955
Kecamatan Bola	2545	204	12	2761
Kecamatan Doreng	2524	206	19	2749

¹⁴ Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, tanggal 12 Mei 2020 pukul 12.41 WIB

Kecamatan Mapitara	1960	53	15	2028
Kecamatan Waigete	7269	464	45	7778
Kecamatan Waiblama	1806	27	15	1848
Kecamatan Kewapante	2621	149	15	2785
Kecamatan Palue	1652	6	0	1658
Kecamatan Nelle	1800	67	4	1871
Kecamatan Magepanda	1256	12	6	1274
Kecamatan Alok	1551	65	13	1629
Kecamatan Alok Barat	2330	155	20	2505
Kecamatan Alok Timur	2589	165	19	2773

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka¹⁵

Berdasarkan data diatas, penulis memilih tiga wilayah di Kabupaten Sikka dengan jumlah populasi HPR tertinggi yaitu Kota Maumere yang terdiri dari Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat dan Kecamatan Alok Timur dengan jumlah populasi sebanyak 6.907 ekor, Kecamatan Kewapante sebanyak 2.785 ekor, dan Kecamatan Waigete sebanyak 7.778 ekor.

Jumlah populasi HPR tertinggi di Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete adalah anjing. Hal tersebut dikarenakan anjing memiliki hubungan dan nilai sosial, budaya yang penting dalam masyarakat. Anjing digunakan untuk menjaga rumah dan untuk adat istiadat (upacara adat) sehingga populasi anjing tinggi dan anjing selalu dibiarkan berkeliaran

¹⁵ Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Ibid.

bebas siang dan malam. Selain itu anjing juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk menambah pendapatan masyarakat baik hidup maupun mati (daging).

Dengan menimbang pada wabah rabies yang melanda Kabupaten Sikka sejak Tahun 1998 yang menjadi permasalahan yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies untuk mengatasi masalah Rabies di Kabupaten Sikka.¹⁶ Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum dalam penetapan berbagai kebijakan dan langkah-langkah penanggulangan rabies dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan rabies, seperti upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengendalikan dan memberantas rabies.¹⁷

Adapun ruang lingkup dalam penanggulangan rabies yang meliputi tanggung jawab penanggulangan, pemeliharaan Hewan Penular HPR, vaksinasi HPR, eliminasi HPR, pengalihan kepemilikan HPR dalam daerah, penanganan terhadap korban gigitan HPR dan HPR, peran serta masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah, larangan, pembiayaan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.¹⁸

Atas dasar latar belakang masalah Rabies di Kabupaten Sikka sebagaimana telah diutarakan diatas, maka penulis memandang penting dan

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies, Op.cit.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies, Ibid.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies, Ibid.

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies khususnya “Upaya Penanggulangan Rabies” yang diatur dalam Bab V pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 13 dan Bab VI, Pasal 15 dan pasal 16 yaitu melihat keterlibatan masyarakat, dan organisasi non pemerintah dalam mengatasi masalah rabies yang ada di Kabupaten Sikka.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi tentang Rabies

Masalah yang pertama, kurangnya sosialisasi tentang Rabies yang merupakan masalah dalam upaya pencegahan rabies. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang Penanggulangan Rabies sudah dibuat sejak tahun 2014. Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, seharusnya masalah Rabies di Kabupaten Sikka dapat berkurang. Namun, meskipun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies sudah dijalankan selama 6 tahun ini, penulis masih menemukan tingginya jumlah kasus Rabies di Kabupaten Sikka. Dimana berdasarkan tabel 1.1 tentang Situasi Rabies di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara timur. Berdasarkan data dari Medika Star pada tahun 2018 di Kabupaten Sikka jumlah kasus GHPR sebesar 1614 kasus. Sedangkan

untuk Lyssa sebesar 29 Kasus.¹⁹ Hal ini dikarenakan kurang adanya pemahaman masyarakat mengenai masalah rabies dan pemberian vaksinasi yang tidak mencakup semua daerah.

Penulis mewawancarai N yang merupakan masyarakat Kabupaten Sikka, Ia mengatakan bahwa:

“Su 6 bulan ni terhitung dari anjing sa punya sa beli sampai sekarang belum ada yang datang vaksin, tu hari pernah ada pengumuman mo vaksin anjing tapi kami pu anjing belum dapat-dapat tu. Sekarang mungkin belum giliran di kami pu desa karna biasanya yang vaksin tu tenaga kontrak semua dikasih target begitu. Kalo ada sosialisasi tentang masalah rabies ju hanya di Desa sa ni, tidak di Dusun atau RT jadi banyak yang tidak mo datang karna jauh tu. (sudah 6 bulan dari saya beli anjing belum ada yang datang memberikan vaksin, padahal sudah ada pengumuman mau vaksin anjing tetapi desa kami belum mendapat giliran. Untuk sosialisasi hanya dilakukan di Desa sehingga banyak yang tidak datang karena jauh). ”²⁰

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan R, Ia mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi tergantung dari perangkat desa, puskesmas ato pastor paroki, dia punya program. Kalo misalnya su ada gejala-gejala banyak anjing kena rabies baru mereka turun suh sosialisasi. (Untuk sosialisasi tergantung dari program perangkat desa,

¹⁹ Medika Star, *Sikka KLB Rabies, Kadinkes: Kasus Rabies Hampir Pasti Diakhiri dengan Kematian!*, Medika Star, 2019 <http://medikastar.com/sikka-klb-rabies-kadinkes-kasus-rabies-hampir-pasti-diakhiri-dengan-kematian/>

²⁰ Wawancara Via Whatsapp kepada N, pada tanggal 16 November 2019, pukul 15.35 WIB

puskesmas atau pastor paroki. Sosialisasi akan dilakukan ketika sudah ada banyak gejala-gejala rabies)."²¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melihat masalah Rabies di Kabupaten Sikka terjadi karena kurang adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dari Rabies itu sendiri. Sosialisasi akan dilakukan ketika sudah terdapat banyak indikasi Rabies.

2. Kurangnya persediaan Vaksin Anti Rabies

Masalah yang kedua, kurangnya persediaan Vaksin Anti Rabies merupakan masalah dalam upaya pengendalian Rabies. Berdasarkan data dari Media Indonesia pada tanggal 21 Juni 2019, alokasi vaksin anti rabies (VAR) pada tahun 2019 hanya sebanyak 22.000 dosis yang terdiri dari 12.000 dosis berasal dari Pemerintah Pusat dan 10.000 dosis berasal dari Pemerintah Daerah. Persediaan VAR yang terbatas tidak cukup untuk mencegah penularan virus rabies, hal ini dikarenakan cakupan vaksinasi minimal mencapai 70% dari populasi anjing yang ada di Kabupaten Sikka.²²

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu L selaku tenaga kesehatan di Puskesmas, ia mengatakan bahwa :

*"Yang tidak resiko tinggi kita observasi saja. Yang termasuk resiko tinggi adalah telapak tangan, kaki, leher keatas dan kemaluan."*²³

²¹ Wawancara Via Whatsapp dengan R, pada tanggal 17 November 2019, pukul 09.40 WIB

²² Palce Amalo, *Lima Warga Sikka Tergigit Anjing Rabies*, Media Indonesia, 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/242555-lima-warga-sikka-tergigit-anjing-rabies>, diakses 22 September 2019, pukul 03.31 WIB

²³ Wawancara Via Telp dengan Ibu L, tanggal 11 Oktober 2019, pukul 08.33 WIB

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah kekurangan vaksin petugas kesehatan melihat pada resiko dari gigitan anjing, petugas kesehatan tidak dapat memberikan kepada semua korban yang digigit. Pemberian vaksin hanya diprioritaskan untuk korban gigitan yang beresiko tinggi yaitu gigitan pada ujung jari kaki, tangan, kemaluan, bahu, leher. Untuk gigitan yang beresiko rendah petugas kesehatan melakukan observasi terlebih dahulu selama kurang lebih dua minggu, dan korban baru bisa diberikan vaksin anti rabies jika anjingnya mati dan terdapat virus Rabies.

3. Penolakan masyarakat terhadap pemberian Vaksin kepada Anjing

Masalah yang ketiga, penolakan masyarakat terhadap pemberian Vaksin kepada Anjing merupakan masalah dalam upaya pemberantasan Rabies. Berdasarkan data dari Pos Kupang pada tanggal 16 Juli 2019, pemberian vaksin rabies membentuk kekebalan tubuh anjing dari virus rabies tak semudah dibayangkan. Pemilik yang memahami vaksinasi merelakan anjingnya divaksin, namun ada pula pemilik menolak anjing diberi vaksin. Drh. Maria Margaretha Siko, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian mengatakan Suka duka sering dialami petugas kami di lapangan melakukan vaksinasi anjing. Ada pemilik menolak dan ada yang sembunyikan anjing.²⁴

²⁴ Eugenius Moa, Suka Duka Petugas Vaksin Anjing Rabies di Sikka, Pos Kupang, 2019. <https://kupang.tribunnews.com/2019/07/16/suka-duka-petugas-vaksin-anjing-rabies-di-sikka>, diakses tanggal 8 Februari 2020, pukul 01.41 WIB.

Penulis melakukan wawancara dengan T, Ia mengatakan bahwa :

“Tapi kalo anjingnya di vaksin kebanyakan angka kematiannya cepat, mereka biasanya malas makan dan itu tiba lama lagi mereka mati. Mereka kadang lemas-lemas saja, jadi kebanyakan masyarakat kalo anjingnya mau di vaksin biasanya di kasih sembunyi. Masyarakat kebanyakan tidak mau kasih kalo anjingnya di vaksin. (Kebanyakan anjing yang divaksin angka kematiannya tinggi, anjing menjadi malas makan, lemas dan akan mati sehingga masyarakat memilih untuk menyembunyikan anjing dan menolak untuk memberikan vaksin).”²⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak L. Ia mengatakan bahwa :

“Aduh kalo vaksin anjing saya tidak mau memang, nanti anjing mati. Saya pengalaman langsung saya punya anjing mati setelah orang vaksin ni kah. Saya punya anjing jadi tidak mau makan baru kaya penyakitkan saja lemah leo sekali. (aduh, kalau vaksin anjing saya sama sekali tidak mau karena anjing bisa mati. Pengalaman saya setelah anjing diberi vaksin, anjing tersebut mati. Anjing menjadi malas makan dan lemah).”²⁶

Berdasarkan dari wawancara dengan beberapa orang yang berada di Kabupaten Sikka, ternyata masih banyak masyarakat yang menolak untuk diberikannya vaksin kepada anjing mereka. Hal ini dikarenakan kebanyakan anjing yang diberi vaksin memiliki umur yang pendek. Setelah anjing diberikan vaksin anjing tersebut menjadi lemas, malas makan dan kemudian mati. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih

²⁵ Wawancara Via Facebook dengan T, pada tanggal 6 September 2019, pukul 22.35 WIB.

²⁶ Wawancara Via Telepon dengan Bapak L, pada tanggal 7 Februari 2020, pukul 15.40 WIB.

untuk menyembunyikan anjing mereka ketika ada petugas yang datang untuk memberikan vaksin.

Namun masalah ini tidak terjadi pada semua anjing, ini dapat dilihat dari wawancara dengan R, Ia mengatakan bahwa :

“Kalo kami di sini kasih ade, soalnya sempat program juga desa Nelle anti Rabies. Anjing setelah disuntik aman saja, kalo rabies otomatis mati. Kalo suntik-suntik begitu namanya hewan pasti adaptasi dulu satu sampe tiga hari, makan juga jadi malas tapi setelah itu baik, karna suntik kan pasti luka. Vaksin Rabies ni kan keras ade, jadi anjing-anjing pasti lemah malas makan. Jadi kita kasih mereka minum air gula. Tergantung tuan pemilik tu, kalo habis suntik begini tidak mo rawat anjing te pasti mati ade. (Kami disini memberikan vaksinasi karena ini merupakan program dari Desa. Anjing tidak memberikan reaksi (aman) setelah diberikan vaksin, tetapi anjing akan mati kalau anjing tersebut mengidap rabies. Setelah pemberian vaksin hewan akan beradaptasi selama satu sampai tiga hari dan malas makan. Vaksin rabies keras, jadi anjing pasti lemah dan malas makan. Setelah di Vaksin anjing diberi minum air gula dan merawat anjing tersebut).”²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penolakan yang dilakukan masyarakat terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam penanggulangan rabies. Seperti yang dikatakan oleh R bahwa mereka senang jika anjing mereka diberikan vaksin, walaupun terdapat efek samping seperti anjingnya menjadi kurang nafsu makan dan lemas. Efek samping ini biasanya terjadi selama satu sampai tiga hari sebagai

²⁷ Wawancara Via Whatsapp dengan R, pada tanggal 17 November 2019, pukul 09.40 WIB

bentuk dari adaptasi dari tubuh anjing terhadap vaksin dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka belum pernah melakukan vaksin rabies kepada anjing mereka, dikarenakan mereka takut anjing mereka mati. Ketakutan ini terjadi karena adanya fenomena anjing mati setelah diberikan vaksin.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis ingin melihat **bagaimana implementasi penanggulangan rabies di Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 tahun 2014?**

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 4 tahun 2014 yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan rabies di Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete.
2. Upaya dalam implementasi kebijakan penanggulangan rabies di Kota Maumere, Kecamatan Kewapante dan Kecamatan Waigete.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan rabies dan dapat memberikan kontribusi pada kajian mata kuliah Implementasi Kebijakan Publik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran untuk Pemerintah Kabupaten Sikka dalam penanggulangan Rabies.